

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI Bandung : Bandung.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dharmawan. Salasa Surya. 2008. *Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada PT. Sandang Anggun Moratex Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Sebelas Maret.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press ; Yogyakarta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. CQ Press : United States
- Grindle, Merille S, (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown University Press : New Jersey.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gavamedia, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka : Jakarta
- Isna, Alizar dan Warto. 2013. *Analisis Data Kuantitatif*. Purwokerto. STAIN Perss.
- Karsidi. Adhi. “Implementasi Kebijakan Upah Minimum Propinsi di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Industri Tekstil PT. Sandratex, PT. Biratex, dan PT. Texmaco)”. Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Makasau, Muslimin Muhammad Andi. 2009. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Upah Minimum pada Hubungan Kerja Perusahaan dengan Pekerja di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 9, Nomor 1, Januari 2009. ISSN 1411-948X

- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of policy implementation*. New York. St. Martin's Press.
- Pamungkas, Setyo. 2010. *Investasi di Era Otonomi daerah Dalam Rangka Interaksi Antara Penanaman Modal Dengan Keuangan Daerah*. Jurnal Hukum Investasi PPs MIH UKSW Sem II-2009/2010.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Prenada Media Group : Jakarta
- Priyono, Edi. 2002. *Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Upah Minimum*. Jurnal Analisis Sosial. Volume 7, Nomor 1, Februari 2002. ISSN 1411-0024.
- Putra, Adi Kurnia Pratama. 2012. *Implementasi Peraturan No. 95 Tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2010 (Studi pada Pekerja Outsourcing di PT. Mekar Jaya Sakti)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa timur.
- Nugroho, Riant. 2011. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Said, Basmi. 2007. "Kajian Penerapan Upah Minimum propinsi (UMP) Sebagai Studi Kasus Pada Industri Pengalengan Ikan (Cannel Tuna Industries) PT. Sinar Purefoods International Belitung". Adiwidia No 5 edisi Maret 2007.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik NonParametrik*. Jakarta. Alex Media Komputindo.
- Setia, Resmi. 2002. *Dewan Pengupahan : Strategiskah Sebagai Alat Perjuangan* Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadin. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. AlfaBeta.
- , 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. AlfaBeta.
- , 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. AlfaBeta.

- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Surakmad, Winarso. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik Edisi 7*. Bandung. Tarsito.
- Suparjan dan Hempri Suyotno. 2002. *Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif*. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Volume 5, Nomor 3. ISSN 1410-4946.
- Syaukani, dkk. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tjandra, surya, Yasmine MS Soraya, dkk. 2007. *Advokasi Pengupahan di daerah Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah*. Jakarta. Trade Union Right Center.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media : Malang
- Wibawa, Samudra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo : Yogyakarta
- Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sumber Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2012.

Profil Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/85 Tahun 2014.

Surat Pengantar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Nomor 045.2/10.801/2014

http://fbkadjateng.blogspot.com/2014_11_01_archive.html. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://banyumasnews.com/81836/dinsosnakertrans-optimis-penerapan-umk-2014-akan-maksimal/>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://www.globalindo.co/2014/11/20/gubernur-jateng-ancam-pidanakan-perusahaan-tak-patuhi-ketetapan-upah>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2141208/tiga-hal-ini-bikin-penetapan-ump-selalu-menimbulkan-gejolak>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://www.merdeka.com/uang/kenaikan-gaji-buruh-tidak-bisa-merata.html>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://news.detik.com/read/2014/11/20/141112/2754178/1536/jelang-pengumuman-umk-buruh-demo-di-ruang-sidang-paripurna-dprd-jateng>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://apindo.or.id/id/press/read/masalah-upah-jadi-isu-krusial-untuk-tingkatkan-daya-saing-indonesia>. Diakses pada 7 Januari 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt523c349fa9a8b/dewan-pengupahan-daerah-perlu-diperkuat>. Diakses pada 7 Januari 2015.